

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Alasan	Penjelasan	Formula/Rumus Perhitungan	Sumber Data		Cara Pencapaian IKU (Program/Kegiatan)	Keuangan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD													
								OPD Utama	OPD Peramping				2019	2020	2021	2022	2023														
1	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	80	Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan ini merupakan pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pada 10 Mei 2019.	IDKPro=Koeff1-gaps+Koeff(kj):Koeff(1-5 Sif(max))+Koeff(1-inDiscr) Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP GSI : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDiscr : Jumlah pelanggaran disiplin, atau dengan Rumus Sederhana $IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$, dimana Indeks Profesionalitas ASN merupakan akumulasi dari Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi (IP1), Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi (IP2), Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja (IP3), dan Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin (IP4).	3KPPD	Seluruh Perangkat Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/(1) SKP Online; (2) Penyusunan Analisis jabatan, Analisis beban kerja, dan Evaluasi Jabatan; (3) Penyusunan Standar Kompetensi PNS; Uraian- undang Nomor 5 Tahun 2014, pp. II Tahun 2011 tentang MaaJelamen ASN dan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018	n/a	74	75	77	78	80	80															
																	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	Persentase	75	Sistem Merit belum berjalan, sehingga dibutuhkan peningkatan pengangkatan aparatur dalam jabatan yang sesuai kompetensi	Jumlah jabatan yang diisi sesuai kompetensi/Jumlah jabatan yang ada	3KPPD	Seluruh Perangkat Daerah	Program Pembinaan Aparatur/(1) pengangkatan ASN dalam jabatan	n/a	45%	50%	65%	70%	75%	
																	Persentase belanganan Disiplin	Persentase	0,50	Pembinaan ASN belum dilaksanakan secara optimal, Aspek Perhimpunan t-hukum terhadap ASN belum signifikan dan tumpang tindih.	Jumlah ASN (PNS) yang Melakukan pelanggaran Disiplin/Jumlah ASN Pemerintah Kota Banjar	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur/(1) Pengadaan Pakelan Dinas; (2) Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan keparutan ASN; (3) Pemeriksaan Disiplin PNS	0,24	1%	0,90%	0,70%	0,60%	0,50%	0,50%
																	Cakupan Pengalasan Data dan Aplikasi Kepegawaian	Persentase	100	Data Kepegawaian Daerah belum terintegrasi kedalam Sistem Pengelolaan Kepegawaian Pemerintah Pusat, sehingga berdampak terhadap pelayanan kepegawaian diantaranya masalah Paperless dalam KPO	Data ASN yang relevan dalam SIMPEG/Jumlah Data SAKIP*100	BKPPD	Seluruh Perangkat Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/(1) Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis IT	0%	0%	70%	80%	90%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai SAKIP	Skor	64,2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Masih Rendah	Skor SAKIP hasil Reviu Instansi terkait	Inspektorat	BKPPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,31	61,80%	62%	62,50%	63,45%	64,20%	64,20%															

KEPALA

Drs. H. KASWARTI, M. Pd. I.
Pembina Utama Muda, IV/c
N/P. 19700102 199403 1 002